

# PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA



## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL SURVEI PERSEPSI KORUPSI 彭guna Layanan Pengadilan TRIWULAN II TAHUN 2022

## KATA PENGANTAR

Pelaksanaan survei persepsi korupsi dimaksudkan sebagai evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan publik. Survei dilakukan untuk memperoleh nilai indeks persepsi korupsi (IPK).

Nilai IPK memberikan informasi tentang persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik di pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bebas dari korupsi. Dari hasil survei ini selanjutnya Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan tindak lanjut sebagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Laporan tindak lanjut hasil survei persepsi korupsi triwulan II tahun 2022 ini disusun untuk memberikan informasi atas tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk memperbaiki pelayanan publik yang bebas dari korupsi.

Sidoarjo, 11 Juli 2022



***DAFTAR ISI***

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I PENDAHULUAN	4
BAB II HASIL SURVEI PERSEPSI KORUPSI	6
BAB III TINDAK LANJUT HASIL SURVEI	11
BAB IV PENUTUP	15

***DAFTAR TABEL***

Tabel II.1	Peringkat Masing-masing Unsur Berdasarkan Nilai Interval Di Triwulan II	8
------------	--	---

## BAB I **PENDAHULUAN**

**1**

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pengadilan Militer III-12 Surabaya berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2015 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Untuk mengukur indeks persepsi korupsi, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan survei. Survei persepsi korupsi ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Survei IPK di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilakukan secara manual dengan cara menyebarkan lembar kuesioner kepada para pengunjung dan pengguna layanan peradilan.

Hasil dari survei IPK ini akan memberikan data tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Data ini akan memetakan unsur-unsur pendukung dan penghambat dalam pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Melalui data-data ini Pengadilan Militer III-12

Surabaya akan melakukan uji permasalahan dan selanjutnya akan melakukan tindak lanjut atas permasalahan yang muncul.

Tindak lanjut ini penting untuk dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tindak lanjut ini juga merupakan bentuk keseriusan Pengadilan Militer dalam memenuhi komitmennya dalam mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan kerjanya.

## BAB II

# HASIL SURVEI PERSEPSI KORUPSI

# 2

Pengukuran Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2022 dilaksanakan empat kali dalam setahun yaitu di triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV. Survei dilaksanakan dengan metode kuantitatif dan sampel diambil dengan teknik *simple random sampling*.

Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, antara lain : Pencari keadilan, Oditur Militer, dan Dinas Hukum Satuan Pengadilan Militer dll sejumlah 50 (lima puluh) orang.

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada faktor-faktor yang berpengaruh dalam timbulnya persepsi korupsi. Unsur penilaian sebanyak 8 ruang lingkup dengan tujuan untuk lebih merinci kategori persepsi korupsi, yaitu :

### 1. KKN

KKN adalah suatu tindakan yang hanya menguntungkan suatu pihak tertentu yang memiliki kekuasaan berlebih sehingga orang-orang kecil dan jujur akan dirugikan.

### 2. Kesesuaian Layanan

Kesesuaian Layanan adalah suatu pemberian kualitas pelayanan yang baik dan benar sehingga bisa memenuhi kebutuhan pelanggan, Kualitas pelayanan yang baik dan benar juga dapat meningkatkan daya saing Instansi.

### 3. Pen-calо-an

Pen-calо-an adalah Pengunaan jasa perantara dalam mendapatkan layanan.

#### 4. Diskriminasi

Diskriminasi adalah tindakan atau perilaku yang tidak adil atau membedakan yang dimaksudkan untuk membatasi individu/kelompok untuk mendapatkan pelayanan yang sama seperti individu/keompok lain.

#### 5. Pungutan Liar

Pungutan liar adalah biaya/tarif yang dikenakan kepada penerima layanan di luar biaya resmi yang telah ditetapkan.

#### 6. Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian baik berupa uang/hadiah/fasilitas dan atau imbalan lainnya yang mengandung maksud untuk memperlancar tercapainya suatu kepentingan.

#### 7. Transaksi Rahasia

Transaksi rahasia adalah kesepakatan atau pemberian layanan yang tidak dilakukan secara transparan serta tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

#### 8. Kesesuaian Produk

Kesesuaian Produk adalah suatu tindakan dimana produk tersebut dapat diterima dipasaran dan sesuai dengan segmentasi yang ditargetkan.

Berdasarkan survei persepsi korupsi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2020 diketahui bahwa Indeks persepsi korupsi (IPK) pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Triwulan II sebesar **93.625** dengan Jumlah nilai rata-rata per unsur sebesar **3,76**. Nilai IPK ini berada pada interval 88,31-100,00 sehingga Mutu pelayanan mendapatkan nilai **A** dan kinerja unit pelayanan berada pada kategori **Sangat Baik**.

Sebagai gambaran ringkas atas tingkat mutu pelayanan masing-masing unsur, dapat dibuat peringkat berdasarkan nilai rata-rata unsur dan kinerja unit

pelayanan. Peringkatan ini dapat membantu mengetahui unsur mana yang telah berjalan baik dan unsur mana yang masih membutuhkan tindak lanjut perbaikan.

Tabel II.1  
Peringkat Masing-masing Unsur Berdasarkan Nilai Interval Di Triwulan I

No	Unsur	Nilai Rata-rata	Kinerja Unit Pelayanan	Peringkat
1	KKN	3.74	Sangat Baik	5
2	Kesesuaian Layanan	3.8	Sangat Baik	1
3	Pen-calо-an	3.78	Sangat Baik	2
4	Diskriminasi	3.74	Sangat Baik	3
5	Pungutan Liar	3.74	Sangat Baik	4
6	Gratifikasi	3.72	Sangat Baik	8
7	Transaksi Rahasia	3.74	Sangat Baik	6
8	Kesesuaian Produk	3.7	Sangat Baik	7

Sebagai perbaikan dan peningkatan pelayanan, maka tindak lanjut yang dilaksanakan didasarkan pada penilaian hasil survei pada ruang lingkup yang berada di peringkat 3 (tiga) paling bawah, yaitu :

1. Gratifikasi
2. Kesesuaian Produk
3. Transaksi Rahasia.

## BAB III

# TINDAK LANJUT HASIL SURVEI

# 3

Dari hasil penilaian survei IPK yang diterima oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah dilaksanakan upaya tindak lanjut untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga tercapai dan terpenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

Sampai dengan dibuatnya laporan ini, ada beberapa upaya tindak lanjut yang telah dilakukan dan ada pula yang masih dalam rencana tindak lanjut. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala, baik kendala teknis maupun non teknis. Upaya tindak lanjut untuk masing-masing saran perbaikan tersebut yaitu :

### 1. Ruang Gratifikasi

Analisa Masalah : Pengguna Layanan merasa bahwa di Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdapat gratifikasi atau hadiah pemberian dalam bentuk uang, barang atau fasilitas tertentu yang diberikan oleh penerima layanan kepada petugas sebagai imbalan atas layanan yang diberikan.

Rencana Tindak Lanjut : Menekankan agar seluruh personil Pengadilan Militer III-12 Surabaya agar revolusioner melakukan perubahan sikap untuk menghindari berbagai penyimpangan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi atau suap.

- Harus ada komitmen yang kuat untuk menolak semua jenis hadiah atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
- Penerapan reward dan sanksi yang tegas.

Tindak Lanjut : Telah melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan maka semua petugas pelayanan harus memberikan pelayanan terbaik kepada semua pengguna layanan dan tidak menerima imbalan atau gratifikasi dari pengguna layanan.

Eviden tindak lanjut tentang gratifikasi telah terpasang banner yang menginformasikan tentang bebas dari Korupsi dan gratifikasi.



## 2. Ruang lingkup Kesesuaian Produk

Analisa Masalah : - Pengguna layanan merasa produk pengadilan yang diperolehnya kurang sesuai dengan yang diminta atau dimaksudkan.  
- Pengguna layanan merasa produk berupa informasi jadwal sidang tidak sesuai antara

yang ditampilkan di website/monitor dengan di lapangan.

Rencana Tindak Lanjut :

- Mengarahkan para pengguna layanan untuk menuliskan atau menyampaikan dengan jelas produk pengadilan yang dibutuhkan.
- Menenkankan kepada petugas layanan agar memahami produk pengadilan yang dibutuhkan para pengguna layanan.
- Mengupayakan jadwal sidang secara tepat waktu.

Tindak Lanjut :

- Telah mengarahkan para pengguna layanan untuk menuliskan di formulir permohonan atau menyampaikan kepada petugas dengan jelas produk pengadilan yang dibutuhkan.
- Telah memberikan arahan kepada petugas layanan agar memahami dan memberikan produk pengadilan sesuai yang dibutuhkan oleh para pengguna layanan.
- Telah melakukan koordinasi dengan Oditur Militer dan para pihak lain untuk dapat mematuhi jadwal sidang yang telah direncanakan.

Dokumentasi melakukan koordinasi dengan Oditur Militer dan para pihak lain untuk dapat mematuhi jadwal sidang yang telah direncanakan.



### 3. Ruang lingkup Transaksi Rahasia

Analisa Masalah : - Penyelesaian perkara di Pengadilan Militer

III-12 Surabaya tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff Pengadilan diluar Persidangan atau diluar prosedur.

- Di Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdapat peraturan tentang tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff Pengadilan diluar Persidangan atau diluar prosedur.

Rencana Tindak Lanjut : - Menyampaikan kepada para pengguna layanan bahwa penyelesaian perkara di

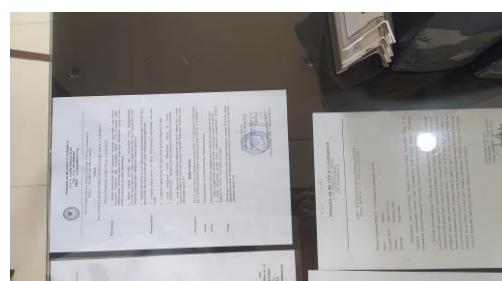
Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff Pengadilan diluar Persidangan atau diluar prosedur.

- Memasang banner yang menginformasikan tentang biaya-biaya yang muncul saat memohon informasi.

Tindak Lanjut

- : - Telah disampaikan kepada para pengguna layanan bahwa penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff Pengadilan diluar Persidangan atau diluar prosedur.
- Ditekankan kepada petugas PTSP agar memberikan informasi yang selengkapnya mengenai tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff Pengadilan diluar Persidangan atau diluar prosedur.
  - Telah terpasang banner yang menginformasikan tentang alur perkara

Eviden tindak lanjut ruang lingkut Transaksi Rahasia dimana di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah terpasang banner yang menginformasikan tentang alur perkara dan biaya peroleh informasi yang terdapat di meja PTSP.



## BAB IV **PENUTUP** 4

Dari hasil survei indeks persepsi korupsi (IPK) triwulan II tahun 2022, diperoleh penilaian terhadap ruang lingkup yang berada di peringkat 3 paling bawah, yaitu :

1. Gratifikasi
2. Kesesuaian Produk
3. Transaksi Rahasia.

Evaluasi dilakukan terhadap 3 ruang lingkup tersebut dan telah dilakukan analisa masalah serta tindak lanjut untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan.